



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : BADAN KEUANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TITIK ENDAH UTARI
2. Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
3. NHK : 864455

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.600.086.800

1. Tanah dan Bangunan Seluas 448 m2/347 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 565.000.000
2. Tanah Seluas 1.734 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 210.500.000
3. Tanah Seluas 1.460 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 155.750.000
4. Tanah Seluas 1.625 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 383.525.000
5. Tanah Seluas 722 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 106.411.800
6. Tanah Seluas 325 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 178.900.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 83.140.000

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 68.300.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 14.840.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 101.920.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 396.179.319

F. HARTA LAINNYA Rp. 21.500.000

Sub Total Rp. 2.202.826.119



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.202.826.119

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.